



SUMBER BERITA

SELASA, 6 NOVEMBER 2018

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kejati Lirik Bimtek ke Jawa dan Bali

**Perangkat Desa
Gunakan DD**

BENGKULU - Penggunaan dana desa (DD) di Bengkulu Tengah (Benteng) sejak tahun 2017 untuk kegiatan ke Jawa dan Bali yang katanya bimtek perangkat desa, dilirik TP4D Kejati Bengkulu. Ketua Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang juga Asisten Intelijen Kejati Bengkulu, Bambang Marsana, SH, MH mengatakan akan segera berkoordinasi dengan Pidsus Kejati.

Setelah mendalami informasi ini, selanjutnya kata Bambang didampingi Sekretaris TP4D Marcos Marudut Mangapul Simaremare, SH, M.Hum, dilakukan pengkajian aturan yang menjadi dasar penggunaan DD untuk bimtek perangkat desa. Apakah berguna bagi program dana desa atau ada tujuan yang lain. "Kita akan koordinasikan hal ini segera," ujar Marcos Marudut Mangapul Simaremare.

Data dihimpun tahun 2017 perangkat di 143 desa di Kabupaten Benteng melakukan bimtek ke beberapa provinsi di Jawa dan juga Bali. Setiap

desa ada yang memberangkatkan dua sampai tiga perangkat desa. Satu orang perangkat desa menghabiskan anggaran Rp 7,5 juta hingga Rp 10 juta. Dana tersebut diambil dari dana desa masing-masing desa.

Marcos mengatakan, setelah terkumpul data nanti, mereka akan melakukan evaluasi terhadap bimtek tersebut. Disepadankan apakah tujuan bimtek tersebut sama dengan tujuan dana desa. Tujuan dana desa adalah untuk pemberdayaan masyarakat dan untuk pembangunan.

"Dengan adanya bimtek ini, ada tidak pengaruhnya untuk kedua tujuan itu. Pertama mungkin iya ada pelatihan terhadap pelaksana dana desa. Kalau pelaksanaanya juga tidak paham (walau sudah ikut bimtek). Dilihat juga misalnya kegiatan di dalam Bimtek yang dilaksanakan adalah hal kecil. Tapi bimteknya luar biasa jadi tidak sebanding. Apalagi jika bimtek itu ada keuntungan pribadinya," terangnya.

Menurut Marcos, TP4D akan berhati-hati jangan sampai nantinya dengan "melirik" bimtek kades ini malah mengganggu program dana desa yang merupakan program



SUMBER BERITA

SELASA, 6 NOVEMBER 2018

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kejati Lirik Bimtek ke Jawa dan Bali

pemerintah pusat. Jika dalam pelaksanaan dana desa ini ada yang salah, harus diberikan peringatan untuk perbaikan ke depannya.

“Kita harus berhati-hati dana desa jangan sampai disalahgunakan. Kita tidak refresif yang nanti bisa membuat penggunaan dana desa terganggu. Ini harus dijaga, jangan sampai program pemerintah pusat di desa mandeg akibat ada perbedaan pendapat penggunaan dana desa. Kita dalam hal ini sangat serius, kejaksaan mendapatkan mandat dan dapat MoU dengan Kementerian Desa bagaimana memberikan bimbingan terhadap pemerintah desa, supaya penggunaan dana desa tepat sasaran,” jelasnya.

Dia mengatakan setiap tahun terjadi perubahan petunjuk penggunaan dana desa. Seperti tahun 2018, dana desa ada program padat karya. Tahun sebelumnya dana desa bisa digunakan untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. Ada dua pokok utama di sana, yakni dalam hal pembangunan dan pemberdayaan, apakah boleh dilakukan bimtek pada aparat dan pelaksana di lapangan.

“Ini ada aturan mainnya. Ada batasannya. Sejauh mana manfaatnya. Ini ada proses (usulan bimtek). Mulai dari desa sampai nanti meminta evaluasi pada bupati. Ini akan dikaji sejauh mana ini telah dilakukan,” terangnya.

Kalau ternyata bimtek ini berguna untuk kepentingan dana desa, perangkat desa sah saja mengikuti bimtek. Tapi kalau bimtek ini untuk kepentingan lain yang sifatnya menguntungkan pribadi atau golongan, ini akan menjadi perhatian penegak hukum. “Minimal memberikan pencerahan pada kades dan perangkat desa lainnya, bagaimana penggunaan dana desa yang baik dan benar. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan atau ketidak tahuan sehingga dana desa salah sasaran,” ujarnya.

Masih menurut Marcos, modus tindak pidana korupsi itu banyak. Salah satunya membungkus suatu kegiatan untuk menguntungkan pribadi atau orang lain. Kalau di dalam bimtek kades ini, terjadi hal itu tentu masuk ranah pidana. “Tapi tidak semudah itu menuding suatu peristiwa pidana,” tutupnya. (del)